

Representasi Kepemimpinan *Klebun* Perempuan di Madura: Upaya Menuju Kepemimpinan Perempuan Mandiri

Aminah Dewi Rahmawati¹ & Kuntum Chairum Ummah

Universitas Trunojoyo

Abstract

*Women's involvement in politics continues to be encouraged along with efforts to strengthen gender equality in various fields. The field of politics and leadership for women is still unfinished at the practical level, especially at the base of society which still has a very strong patriarchal culture. This can be seen from the low representation in quantity and substance. At the village community level, gender equality in politics and leadership still leaves issues that hinder women's participation in this sector. Madura is an area where patriarchal culture is very strong. The sustainability of the institutional order of society is dominated by men, including political and leadership institutions. Along with the changes in village leadership in Madura, currently there has been a change with the emergence of several women as leaders in Madura villages. The purpose of this article is to uncover the representation of *klebun* women to become independent leaders out of the patriarchal domination that arises from dynastic systems. This is motivated by the number of female *klebun* in Madura who still have kinship ties with the previous *klebun*. The position of *klebun* (village head) in Madura has become an arena for building political dynasties. By using representation indicators and Max Weber's leadership model as well as a qualitative approach, the problem formulation will be analyzed and presented in depth. The results of this study will show several models of women's representation in village leadership: first, *Klebun* women are able to present leadership in the village. Second, the efforts made by *klebun* Perempuan in realizing independent women leaders.*

Keywords: representation, leadership, *klebun* Perempuan

Abstrak

Keterlibatan perempuan dalam bidang politik terus dipacu seiring dengan upaya penguatan kesetaraan gender di berbagai bidang. Bidang politik dan kepemimpinan bagi perempuan masih belum selesai ditataran praktik terutama pada basis masyarakat yang masih memiliki kultur patriarki yang sangat kental. Hal ini dapat dilihat dari representasi secara kuantitas maupun substansi yang masih rendah. Pada tingkat masyarakat desa kesetaraan gender di bidang politik dan kepemimpinan masih menyisakan persoalan-persoalan yang menghambat lajunya partisipasi perempuan di sektor ini. Madura sebagai wilayah dengan kultur patriarki yang sangat kental memiliki tatanan kelembagaan masyarakat yang didominasi laki-laki, termasuk didalam lembaga politik dan kepemimpinan. Seiring perubahan kepemimpinan desa di Madura, saat ini sudah menampakkan perubahan dengan munculnya beberapa perempuan sebagai pemimpin di desa-desa Madura. Tujuan dari artikel ini akan membongkar tentang representasi dari *klebun* (kepala desa) perempuan untuk dapat menjadi pemimpin yang mandiri keluar dari dominasi patriarki yang muncul dari sistem-sistem dinasti. Hal ini dilatarbelakangi dengan banyaknya *klebun* perempuan di Madura yang masih memiliki ikatan kekerabatan dengan *klebun* sebelumnya. Kedudukan *klebun* di Madura menjadi ajang untuk membangun dinasti politik. Dengan menggunakan indikator representasi dan model kepemimpinan Max Weber serta pendekatan kualitatif rumusan masalah akan dapat dianalisis dan dipaparkan secara mendalam. Hasil dari kajian ini akan menunjukkan beberapa model representasi perempuan dalam kepemimpinan desa yaitu pertama, perempuan mampu mempresentasikan kepemimpinan di desa. Kedua, upaya yang dilakukan oleh *klebun* perempuan dalam mewujudkan pemimpin perempuan yang mandiri.

Kata Kunci: representasi, kepemimpinan, *klebun* perempuan

¹ aminah.rahmawati@trunojoyo.ac.id

Pendahuluan

Pembangunan yang terus menerus dilakukan pasca kemerdekaan merujuk pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di semua bidang. Dalam bidang politik pembangunan merujuk pada upaya untuk terus meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama bagi kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan. Salah satu kelompok terpinggirkan yang partisipasi politik masih rendah adalah kelompok perempuan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik angka partisipasi perempuan di parlemen tahun 2021 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia hanya satu provinsi yang melampaui target kuota 30 persen, yaitu Kalimantan Tengah. Sementara itu, di tataran nasional, angka keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam tiga Pemilu belum menunjukkan penguatan yang permanen. Hal ini dapat dilihat dalam capaian persentase perempuan di Parlemen yang masih fluktuatif, yaitu 17,9 persen pada periode 2009-2014, 17,3 persen pada periode 2014-2019, dan 20,5 persen pada periode 2019-2024. Padahal secara regulasi upaya mendorong partisipasi perempuan sudah dilakukan sejak pemilu 2004 dengan model *affirmative action*.

Pada tingkat Kepala Daerah hingga Kepala Desa partisipasi perempuan lebih sedikit, saat ini jumlah kepala daerah perempuan yang masih menjabat hingga 2023 dan 2024 hanya 24 orang atau sekitar 4 persen. Sedangkan dalam ranah desa berdasarkan data dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dari jumlah seluruh desa di Indonesia sebanyak 81.686 desa, jumlah perempuan yang menjadi kepala desa hanya 3.186. Artinya, jumlah kepala desa perempuan hanya 3,9 persen. Padahal upaya mendorong partisipasi perempuan dalam pemerintahan desa telah dibuka sejak disahkan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Desa memberikan tiga paradigma baru tentang tata kelola desa yaitu, pertama, partisipasi warga untuk terlibat dalam tata kelola desa, kedua, musyawarah desa sebagai ruang partisipasi warga, ketiga, alokasi dana desa dari pemerintah pusat untuk desa.

Di sisi lain persoalan atas partisipasi perempuan dalam politik secara substansi masih meninggalkan catatan yang menunjukkan angka kuantitatif belum selaras dengan substansi peran dan fungsi jabatan-jabatan politik yang diemban perempuan. Keterlibatan perempuan dalam politik masih menunjukkan adanya relasi dengan dinasti politik yang seringkali menunjukkan bahwa perempuan menjadi alat kepentingan bagi dinasti tertentu, efek yang ditunjukkan dengan adanya model ini adalah kemandirian perempuan dalam posisi jabatan hanya sebagai simbol. Selain itu di beberapa daerah berdasarkan Indeks Inovasi Daerah pemimpin perempuan masuk dalam kategori kurang inovasi. Pada keterampilan praktis perempuan masih kurang dalam melakukan komunikasi politik (Laili,2019). Hingga beberapa pemimpin perempuan terlibat dalam tindakan korupsi dari tingkat tersangka hingga sudah terpidana. Deretan catatan kelam perempuan dalam ranah politik menyebabkan kepercayaan terhadap ketangguhan perempuan dalam ranah politik terus dipertanyakan.

Dalam tataran praktek model kepemimpinan akan sangat dipengaruhi oleh cara seseorang memperoleh kekuasaan tersebut. Lebih lanjut Weber menjelaskan dalam bukunya *Economie et Societe* (1995), Weber menjelaskan tiga bentuk model kepemimpinan yaitu, pertama adalah dominasi tradisional yang sumber legitimasinya berupa ciri sakralitas tradisi yang melekat padanya. Weber memasukkan kekuasaan patriarkhis di tengah-tengah kelompok penghuni ruang domestik serta kekuasaan yang dimiliki oleh para tuan tanah ditengah-tengah masyarakat feodal. Kedua dominasi kharismatik, dominasi ini bersumber dari kemampuan

seseorang yang memiliki personalitas tertentu dan dikarunia aura khusus. Pemimpin kharismatik memiliki kemampuan untuk meyakinkan serta mobilisasi massa dan hal ini menjadi kekuatan dalam kekuasaannya. Kemampuan ini didapat dari faktor emosional yang mampu dan berhasil dibangkitkan, dipertahankan, dan dikuasainya. Kekuatan dominasi yang ketiga disebut dominasi legal-rasional yang bertumpu pada kekuatan hukum formal dan impersonal. Kekuasaan ini tidak terletak pada kekuatan personal, akan tetapi pada hukum legal yang mengatur tentang fungsi dari suatu kekuasaan tertentu. Model dominasi ini berkembang pada masyarakat modern, seluruh bentuk kekuasaan didasarkan pada kompetensi, rasionalitas pilihan, dan bukan pada kekuatan irrasional atau emosional. Dalam tatanan dominasi legal rasional keberlangsungan kekuasaan berdasarkan pada kepatuhan terhadap kitab hukum (*code*) fungsional.

Pemimpin di tingkat desa dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 memiliki tugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Secara umum tugas Kepala Desa tidak hanya pada tugas formal yang tertuang di Undang-Undang. Kepala Desa di Madura juga dituntut menjalankan peran-peran sosial (Elly Touwen-Bouwsmma, 1989). Peran sosial Kepala Desa seringkali dalam praktiknya menjadi ukuran keberhasilan kepemimpinan di desa yang mengalahkan tugas pokok dalam undang-undang (Rahmawati, 2021). Mintzberg (2004) menjelaskan bahwa pemimpin memiliki peran yang terbagi menjadi tiga sifat yang meliputi (1) peranan yang bersifat interpersonal. Peran ini meliputi tugas-tugas kepemimpinan yang mengarah pada peran kepala desa sebagai *figurehead*, *leader* dan komunikator. Peran *figurhead* dijalankan kepala desa dalam bentuk kemampuan mengemban tugas-tugas resmi dalam undang. *Leader* adalah peran kepala desa yang berfungsi sebagai penggerak yang mampu memberikan motivasi terhadap bawahan melalui kecapan komunikasi sehingga akan terbentuk team work yang Tangguh dalam pemerintahan desa. Komunikator akan berperan penting ketika kepala desa berfungsi sebagai penghubung dalam upaya membangun kerjasama dengan berbagai pihak. (2) Peranan yang bersifat Informasional yang lebih mengarah kepada proses seseorang menerima dan menyampaikan informasi sehingga seorang pemimpin mampu berperdan sebagai pemonitor, dissiminator dan juru bicara. Terakhir adalah (3) peranan sebagai pengambil keputusan. Pemimpin adalah sosok yang memiliki kewenangan untuk merencanakan, memutuskan dan melaksanakan program serta kebijakan-kebijakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desanya. Kemampuan ini akan sangat didukung oleh kemampuan kepala desa yang berani mengambil keputusan-keputusan.

Di Madura keterlibatan perempuan dalam ranah politik terbilang masih rendah. Periode (2019-2024) jumlah perempuan yang ada di parlemen hanya terdapat di dua kabupaten dari empat Kabupaten yang ada di Pulau Madura yakni Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Bangkalan yang jumlahnya kurang dari 7 persen (Badan Pusat Statistik, 2022). Pada tingkat desa, seluruh kabupaten di Madura sudah muncul kepala desa perempuan. Di Kabupaten Bangkalan sampai tahun 2022 jumlah Kepala Desa perempuan sebanyak 11 orang. Lahirnya kepemimpinan desa di Madura lebih dominan dipengaruhi oleh faktor dinasti (Hidayati, 2015). Kepentingan untuk meneruskan kekuasaan pada keluarga di Madura melahirkan pencalonan perempuan dalam kompetisi pemilihan kepala desa. Pemilihan kerabat perempuan sebagian besar jatuh pada istri atau anak yang dipilih untuk meneruskan jabatan suami atau ayah. Pilihan ini dilakukan dengan orientasi bahwa, pertama Kekuasaan akan tetap ada dalam lingkup

kekerabatan, kedua kekuasaan kepala desa di Madura memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang memiliki *prestige* yang tinggi, ketiga perempuan adalah sosok yang berada dalam kekuasaan laki-laki sehingga akan mudah “diambil alih” kekuasaan sebagai kepala desa.

Upaya melanggengkan kekuasaan kepala desa yang dalam masyarakat Madura disebut *klebun* yang merupakan pemimpin di wilayah desa. Desa, bagi masyarakat Madura tidak hanya sebagai bagian kelompok atas dasar administratif saja, akan tetapi menunjukkan juga sebagai kesatuan sosial kecil yang didasarkan pada hubungan kekeluargaan dan hubungan teritorial. Seperti desa pada umumnya, desa di Madura dipimpin oleh *klebun* dengan di bantu oleh Carik, serta perangkat lainnya. Perangkat pemerintahan desa di Madura sebagian adalah orang – orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Kekuatan hubungan kekeluargaan dalam mengelola desa, menjadikan proses pemerintahan dikelola dengan pragmatis dan kurang memenuhi standar pemerintahan sebagaimana tercantum dalam perundang – undangan. Disamping itu pengelolaan desa secara kekerabatan ini menjadi sarana ‘kaderisasi’ secara tidak langsung bagi anggota keluarga yang nantinya akan dijagokan dalam pemilihan kepala desa berikutnya. Kepala desa merupakan jabatan yang dipilih langsung oleh masyarakat, akan tetapi siapa yang berkuasa seringkali tidak jauh dari hubungan kekerabatan dengan kepala desa sebelumnya. Jabatan kepala desa di Madura, bukanlah pada kapasitas intelektual, akan tetapi pada kekuatan ekonomi dan sosial yang dimiliki seseorang. Biaya yang besar pada proses pencalonan merupakan modal yang harus dibayar oleh calon. Sedangkan kedudukan sosial yang dimiliki oleh calon, akan mendukung bagi kekuatan calon ketika menghadapi calon yang lain. Kenyataan ini, memberi kesimpulan pada Elly Touwen-Bouwsma (dalam Jonge, 1989) bahwa demokratisasi yang menjadi landasan semangat penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Madura hanyalah semu belaka, hal ini dapat dilihat bahwa mereka yang mencalonkan bukanlah dari sembarang orang , akan tetapi hanya mereka yang memiliki kedudukan ekonomi, kekayaan serta pengaruh yang bisa mencalonkan. Bahkan ada kekuatan lain yang berbicara dalam pemilihan kepala desa di Madura, yaitu peran dari komunitas *remo*. Komunitas *remo* tidak hanya menggambarkan solidaritas sosial bagi masyarakat Madura, akan tetapi kekuatan serta kekerasan akan berlaku dalam penyelesaian masalah-masalah di Madura termasuk dalam pemilihan kepala desa. Beberapa kasus pemilihan *klebun* di Madura berakhir dengan tragedi *carok*.

Pada situasi yang sulit beberapa *klebun* perempuan mampu menunjukkan jati diri sebagai pemimpin desa yang mampu merepresentasikan kepemimpinan perempuan dengan gaya kepemimpinan perempuan. Upaya menjadi pemimpin perempuan dalam ruang-ruang dinasti dan patriarki menjadi kajian menarik yang membongkar lapisan-lapisan kekuatan fisik, emosional dan sosial perempuan sebagai *klebun* mandiri. Penelitian ini berupaya untuk mengupas persoalan tentang representasi kepemimpinan *klebun* perempuan di Madura. Kemampuan perempuan Madura dalam menjalankan kepemimpinan di desa merupakan fenomena menarik di tengah kekuatan patriarki yang sangat kental. Selain itu, upaya menjalankan kepemimpinan secara mandiri dari kuatnya pengaruh kerabat hingga persoalan sosial yang patriarki menjadi fakta yang harus terus digali dengan segala kekhasan kultur masyarakat Madura.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Lexy J. Moleong (2014) mengungkapkan metode kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Dalam penelitian ini penggunaan metode kualitatif ditujukan untuk menjelaskan tingkah laku, persepsi, motivasi, tingkah laku, dan lain-lain secara keseluruhan berkaitan dengan fenomena kepemimpinan perempuan Madura di tingkat pemerintahan desa. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kasus. Pendekatan kasus merupakan penelitian yang menguraikan penjelasan secara menyeluruh mengenai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi sehingga pada penelitian tersebut peneliti harus mengolah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti (Mulyana, 2018). Studi kasus yang dipilih dalam penelitian ini adalah studi kasus eksploratif yang bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena yang belum diketahui secara mendalam dalam suatu kasus. Adapun tahapan studi kasus dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1. Pemilihan kasus dengan memilih objek kepemimpinan *klebun* perempuan di Madura;
2. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara terhadap *klebun* perempuan;
3. Analisis data dilakukan setelah data terkumpul dengan mengagregasi, mengorganisasi, dan mengklasifikasi data menjadi unit-unit yang dapat dikelola;
4. Perbaikan (*refinement*) dengan melakukan wawancara kembali pada narasumber yang sama sebagai penyempurnaan atau penguatan (*reinforcement*) data baru. Pengumpulan data baru mengharuskan peneliti untuk kembali ke lapangan dan barangkali harus membuat kategori baru, data baru tidak bisa dikelompokkan ke dalam kategori yang sudah ada;
5. Penulisan laporan.

Hasil dan Pembahasan

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Pulau Madura. Secara geografis Bangkalan menjadi pintu gerbang masuk ke Pulau Madura melalui darat dan laut. Melalui darat Pulau Madura tersambung dengan Pulau Jawa dengan Jembatan Suramadu, sedangkan melalui Laut Madura tersambung dengan pulau-pulau lain melalui beberapa pelabuhan diantaranya Pelabuhan Kamal yang menyambungkan Pulau Madura dengan Jawa. Secara jarak Kabupaten Bangkalan dengan Kota Surabaya saat ini sudah tersambung, akan tetapi masih banyak memiliki perbedaan dalam banyak bidang.

Kehidupan masyarakat Madura masih kental dengan nilai-nilai tradisi. *Bapa Babhu Guru Rato* adalah salah satu nilai yang masih dijunjung oleh masyarakat. Kedudukan ayah, ibu, guru (*kiai*) hingga pemimpin pemerintah sangat dijunjung tinggi, hal ini masih melandasi pemikiran dan praktik kehidupan sehari-hari bagi masyarakat Madura. Pada kenyataannya *kiai* dalam masyarakat Madura memiliki kedudukan yang sangat strategis, mereka tidak hanya dijadikan sumber rujukan dalam bidang keagamaan, akan tetapi dalam kehidupan ekonomi, sosial, serta politik *kyai* memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting di Madura. Kepemimpinan dengan model *monomorphic* masih menjadi ciri dalam kepemimpinan di Madura. *Kiai* tidak hanya sebagai pemimpin agama, akan tetapi kepemimpinan model ini menempatkan posisi *kiai* juga pada posisi kepemimpinan politik lokal dari tingkat desa sampai kabupaten di

wilayah Madura. Kekuatan kultural yang dimiliki kiai, menyebabkan ketergantungan masyarakat Madura yang sangat luar biasa terhadap keberadaan sosok kiai. Dengan kekuatan inilah, maka ketika kiai ikut berkompetisi secara politik baik secara langsung maupun tidak langsung, maka mereka akan mudah memenangkan kompetisi itu. Di sisi lain kekuatan selain kiai bersumber dari kalangan yang dekat dengan kekerasan. Pada masyarakat Madura tergambar dalam kelompok masyarakat yang dinamakan *blater*. *Blater* memiliki peranan penting dalam dominasi kekuasaan di Madura. Mereka menjadi simbol kekuatan bagi setiap calon dalam sebuah ajang pemilihan pemimpin lokal di Madura. *Blater* dalam pandangan Abdur Rozaki (2004) merupakan orang yang memiliki kepandaian dalam hal olah kanuragan, terkadang disertai pula dengan ilmu kekebalan dan kemampuan magis yang menambah daya kharismatis. Menurut Abdur Rozaki (2016), kemunculan *blater* berasal dari kekuatan non keagamaan yang mencerminkan instrumen kekerasan, mereka berasal dari orang – orang yang menang dalam peristiwa carok, terlibat dengan jaringan kumpulan *remoh blater*, sabung ayam, kerapian sapi, dan memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dengan lintas kelompok sosial, sehingga jaringan yang dimilikinya sangat luas termasuk di dalamnya jaringan dalam dunia kriminalitas. Keberadaan mereka telah mewarnai ruang-ruang politik lokal di Madura, tidak hanya dalam peran – peran layar belakang akan tetapi sudah pada posisi – posisi formal seperti kepala desa atau *klebun*.

Dalam pandangan masyarakat Madura kedudukan perempuan ditunjukkan dengan posisi ibu yang menjadi sosok untuk dipatuhi dan dihormati. Posisi perempuan menjadi bagian dari “harta” yang berharga hingga menjadi bagian dari harga diri yang patut untuk dipertahankan. Penghormatan ini berlaku pada peran-peran perempuan dalam keluarga seperti ibu, saudara perempuan hingga istri. Pada ranah publik Tatik Hidayati (2015) menyebut perempuan Madura menjadi sosok yang aktif dalam kegiatan sosial keagamaan. Sedangkan pada ranah kekuasaan sampai di desa-desa laki-laki masih sangat dominan.

Memasuki paska reformasi, terjadi perubahan representasi perempuan dalam kepemimpinan desa di Madura. Perempuan mulai dicalonkan hingga terpilih sebagai kepala desa. Secara bertahap jumlah kepemimpinan di desa semakin bertambah. Data dari Dinas Pemberdayaan dan Pemerintah Desa Kabupaten Bangkalan pada tahun 2022 jumlah kepala desa perempuan di Bangkalan berjumlah 11 orang dari 281 jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Bangkalan.

Tabel 1. Data Kepala Desa Perempuan di Kabupaten Bangkalan

No	Nama Kepala Desa	Desa yang Dipimpin
1.	Sumiani	Desa Bilaporah Kecamatan Socah
2.	Hotibah	Desa Tagungguh Kecamatan tanjung Bumi
3.	Musriyah	Desa Karang Asem Kecamatan Klampis
4.	Ulfatin Anisah	Desa Klampis Barat Kecamatan Klampis
5.	Musarofah	Desa Tunagara Timur Kecamatan Sepuli
6.	Yumi Ida	Desa Blateran Kecamatan Galis
7.	Hamriyah	Desa Lantek Timur Kecamatan Galis

8.	Suaibah	Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar
9.	Siti Fadhilah	Desa Pocong Kecamatan Tragah
10.	Siti Rohmah	Desa Jaddung Kecamatan Tragah
11.	Maesaroh	Desa Bancang Kecamatan Tragah

Masuknya perempuan sebagai Kepala Desa di Kabupaten Bangkalan dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu:

1. Kepala Desa perempuan ditunjuk oleh Bupati sebagai PJ Kepala Desa. Pada waktu PJ Kepala Desa berakhir maka PJ mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dan terpilih
2. Kepala Desa Perempuan terpilih untuk menggantikan kerabat yang berhenti sebelum masa jabatan berakhir. Mekanisme ini disebut PAW (Pergantian Antar Waktu)
3. Kepala Desa terpilih melalui mekanisme Pemilihan Kepala Desa secara langsung.

Yang menarik dari keberadaan *klebun* perempuan di Kabupaten Bangkalan adalah apapun mekanisme yang menyebabkan yang kepala desa perempuan terpilih, sebagian besar memiliki latar belakang kekerabatan dengan kepala desa sebelumnya. Hal ini menunjukkan kuatnya dinasti kekuasaan yang ada di desa-desa. Sebagai bagian wilayah pedesaan kekuatan patrimonial masih kuat didukung dengan budaya patriarki yang masih berlangsung.

Budaya patriarki telah mempengaruhi persepsi dan pemaknaan politik dan kekuasaan. Kekuasaan dan politik menjadi melekat pada sosok laki-laki. Pemikiran dan praktik patriarki telah melanggengkan kekuasaan ada di tangan laki-laki. Kebutuhan kepemimpinan dimaknai sebagai bagian dari upaya penjagaan fisik seperti pemenuhan kebutuhan pangan dan keamanan. Dalam konstruksi tersebut, maka ketika kehadiran perempuan ada dalam ranah kepemimpinan desa maka masyarakat merasa sangsi akan kemampuan perempuan melaksanakan tugas-tugas kepala desa. Di sisi lain latar belakang posisi keluarga dari kepala desa perempuan yang menjadi tokoh di masyarakat menjadikan perempuan dipandang sebagai simbol sedangkan kekuasaan sebenarnya ada di tangan kerabatnya. Dalam situasi ini secara umum keberadaan kepala desa perempuan di Bangkalan dapat dipilah menjadi dua, Pertama kategori Kepala Desa Mandiri. Kepala desa perempuan berusaha untuk memahami dan melaksanakan tugas-tugas kepala desa. Kedua, Kepala desa yang menyerahkan semua atau sebagian tugas-tugasnya kepada kerabat laki-lakinya *Klebun* perempuan mandiri menunjukkan representasi,

1. Pertama dalam tataran tugas formal *klebun* perempuan telah memahami tugas dan wewenang sebagai pemimpin. Upaya ini dilakukan agar tugas yang tercantum dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dapat diselesaikan secara tuntas dalam periode jabatannya. Pada peran ini Kepala Desa Perempuan di Madura dapat menggali masalah yang dihadapi warganya. Melalui pengamatan kepala desa menemukan persoalan desa yang sifatnya massif. Kepala Desa Bancang menginisiasi pembangunan polindes di Desa Bancang karena melihat fasilitas bagi ibu hamil dan anak kurang memadai di desa. Kepala Desa Tagungguh melihat kesadaran hukum warga masyarakat yang masih rendah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tanah, yang seringkali berakhir dengan carok. Solusi yang dimunculkan adalah pendekatan kesadaran hukum dengan terus menerus melakukan edukasi kepada masyarakat untuk menggunakan hukum positif dalam menyelesaikan

sengketa tanah. Upaya ini berhasil dengan berkurangnya konflik tanah yang berakhir dengan carok.

2. Kedua pada tataran tugas secara sosial, *klebun* perempuan memenuhi tuntutan-tuntutan masyarakat terhadap fungsi kepala desa yang mampu menjaga keamanan, hadir dalam kegiatan warga hingga cepat dalam membantu masalah yang dihadapi warga. Tugas ini mampu diselesaikan oleh Kepala Desa Perempuan. Kepala Desa Tagungguh menjadi pemimpin yang dikenal warga sebagai ibu yang mampu melakukan gerak cepat dalam menyelesaikan kesulitan warga terutama di bidang ekonomi. Keberhasilan ini menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa pemimpin perempuan mampu menyelesaikan persoalan sosial ekonomi. Di Desa Tagungguh awal mula kepemimpinan perempuan “diuji” dengan hilangnya sapi warga. Kepala Desa Perempuan diuji untuk dapat menemukan secara cepat dan tepat pelakunya. Dalam jangka waktu yang singkat dengan kemampuan negosiasi dan relasi sapi warga yang hilang dapat ditemukan. Contoh keberhasilan dari kemampuan perempuan dalam menyelesaikan tugas diluar tugas pokok menjadi sumber kepercayaan kepada *klebun* perempuan
3. Dalam relasi dengan keluarga, *klebun* perempuan berani melakukan negosiasi untuk peran-peran publik. Dalam kapasitas sebagai Istri, seringkali kebebasan untuk bertemu dengan laki-laki seringkali mendapatkan hambatan. Hal ini tentu menghambat tugas sebagai kepala desa. Pada prosesnya Kepala desa perempuan dapat melakukan negosiasi dengan suami. Keberhasilan ini menjadikan kepala desa perempuan dapat hadir di forum laki-laki, menemui tamu laki-laki dalam tugasnya sebagai kepala desa

Karakteristik *klebun* perempuan mandiri ditengan kultur patriarki yang menyangsikan kepemimpinan serta kuatnya ikatan kepentingan dinasti dipengaruhi, Pertama kelompok pertemanan. Kelompok pertemanan yang memiliki wawasan, pengetahuan, dan pengalaman yang mendukung pelaksanaan tugas sebagai kepala desa sangat mendukung bagi keberanian, kecakapan dan kemampuan kepala desa perempuan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Kedua, latar belakang pendidikan memberikan wawasan dalam menjalin relasi, menemukan ide serta negosiasi.

Secara bertahap representasi perempuan dalam memimpin desa di Bangkalan yang dinilai positif oleh masyarakat telah melahirkan budaya di masyarakat Madura bahwa perempuan menjadi pemimpin desa adalah sesuatu yang dibolehkan, Kedua Kesansian atas kemampuan perempuan sebagai pemimpin memudar. Hal ini terbukti dengan kepala desa yang dicalonkan dan terpilih kembali.

Kesimpulan

Representasi Perempuan di Desa Madura telah menunjukkan perubahan. Perubahan ini dapat dilihat dari kuantitas. Data menunjukkan ada perubahan representasi kuantitas kepemimpinan desa di Madura yang menunjukkan seluruh Kabupaten di Madura sudah muncul *klebun* perempuan. Kedua secara representasi substansi *klebun* perempuan telah menunjukkan kemampuannya memimpin desa.

Representasi *klebun* perempuan di Madura telah memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait memudarnya kekuatan patriarki yang telah membangun dominasi makna dan praktik kepemimpinan dan kekuasaan sebagai ranah laki-laki.

Daftar Pustaka

- Budiarjo, M. 2014. *Dasar - Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bustani, Abd. Latif. 2007. "Tandha Jungkir Balik Kekuasaan Laki-Laki Madura". *Jurnal Srintil Media Multikultural* no. 013 , hal. 106-118.
- Darwin, Muhadjir. 2001. *Menggugat Budaya Patriarki*. Kerjasama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan.
- , 2005. *Negara dan Perempuan*. Yogyakarta: CV. Adiputra
- Denzim, Norman K. Lincoln, Syvonna S, 2009. *Handbook of Qualitative Research*, (Terjemahan) Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Edward Harden, Bryant, 2014. *Power and representation in Global Governance*. *Jurnal Politics and Government* vol.2 no 2 pp. 01-17
- Hannan, Abdul. 2019. Hegemoni Religio Kekuasaan dan Transformasi sosial. *Jurnal Sosial Budaya Bulan Juni* vol. 16. No.1
- Haryatmoko, 2010. *Kekuasaan Pengetahuan sebagai rezim Wacana Sejarah Seksualitas: Sejarah Pewacanaan sek dan Kekuasaan*. Komunitas Salihara. Jakarta
- Hidayati, Tatik. 2014. Kalebun Babine Konstruksi Budaya Madura dalam Melestarikan Kekuasaan. *Karsa*. Vol. 22 No. 2, hal 151 – 160
- Holillah, 2014. "Fungsi dan Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Desa Masaran, Banyuwates Sampang". *Jurnal Review Politik*. vol. 04, No. 01, hal 120 – 130. Cr
- Juliet, Mitchell. 2000. "Patriarchy and Matriarchy". Feminist Concept Series. Bombay: SNTD
- Jurdi, Fajlurrohman. 2013. *Relasi Kuasa, Ideologi dan Oligarki*. Yogyakarta : Mahakarya Rangkang Offset.
- Karim, A Jalaludin. 2004. *Pemimpin Perempuan Madura*. Surabaya : Papyrus
- , 2007. "Kepemimpinan Wanita Madura". *Jurnal Mimbar*. Vol. 23, No.2 hal. 221-234.
- Kassa, Shimelis."Challenges and Opportunities Of Women Political Participation in Ethiopia". *Journal of Global Economic* 3:162.801:10.4172/2375-4389.1000162. October 26, 2015.
- Kebung, Konrad, 1997. *Michel Foucault: Parhessia dan Permasalahan Etika*. Jakarta: Penerbit Obor, Jakarta
- Konrad, Kebung. 2017. Membawa Kuasa Michel Foucault dalam Konteks Kekuasaan di Indonesia. *Jurnal Melintas* vol 33 no 1 hal. 34-51
- Kurzweil, Edith, 2010. *Jaring Kuasa Struktural*, Kreasi Wacana, Yogyakarta
- Latief, M. Syahbudin, 2000. *Persaingan Calon Kepala Desa di Jawa*. Media Pressindo, Yogyakarta
- Mas' oed, Mohtar. 2003. *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Mino, Vianello. 1990. *Gender Inequality: A Comparative Study of Discrimination and Participation*. London: Sage Publication
- Moelong, Lexy, J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rostrakarya.

- Muh Hefni. 2006. Tirani Kekuasaan dalam Sirkulasi teks (menelaah Pemikiran arkeologi Michel Foucoult tentang Kekuasaan). *Jurnal Karsa Vol IX No 1*
- Mughis Mudhoffir, Abdul. 2013. Teori Kekuasaan Bagi Sosiologi Politik. *Jurnal Masyarakat vol 18 no 1 hal 75-100 Michel Foucoult: Tantangan*
- M. Lukman Hakim, 2014. *Desertasi Praktik dominasi dalam produksi Makna Visi Misi Daerah Penghasil Tambang*
- Pitsoe, Fictor, 2013. Foucoult's Discourse and Power. *Jurnal of Philosophy vol.31 pp. 23-28*
- Sabariman, Hoirul. 2019. Klebun Bebini: Praktik, Gaya kepemimpinan dan Faktor Pendorong Keberhasilan Memimpin Pemerintahan Desa. *Kafa'ah journal of Gender Studies vol 9 no 2*
- Satriyati, Ekna, 2016. Perempuan dan Tradisi Warisan Kuasa (Kajian Pewaris jabatan Kepala desa Suami kepada Istri di Madura. *Prosiding Konferensi Internasional Feminisme: Persilangan Identitas, Agensi dan Politik, hal 2422*
- , 2008. *Strategi Kepemimpinan Kepala Desa di Pademawu Barat, Pamekasan, Madura*, Laporan Studi Kajian Perempuan
- Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Zamroni, M.Imam, 2007. "Kekuasaan Juragan dan Kyai di Madura". *Jurnal Karsa, Vol. XII No. 2 hal. 169-179*.